



**MENTERI NEGARA URUSAN PANGAN/KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PROSPEK DAN TANTANGAN  
DALAM  
MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN**

**Pengarahan pada Seminar Kebijakan dan Strategi  
menuju Swasembada Pangan**

## PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN

### I. PENGANTAR

Inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi, (PSKPG) Lembaga Penelitian IPB untuk mengorganisir Seminar ini saya sambut dengan gembira, karena menunjukkan tingginya kepedulian lembaga tersebut terhadap persoalan di sekitar masalah Pangan dan Gizi. Di banyak negara berkembang, meskipun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, namun masalah pangan masih tetap mendapat prioritas penting. Tanpa pangan yang cukup dan harga yang stabil, sulit bagi suatu negara untuk dapat membangun sektor lainnya. Disamping itu, tanpa gizi yang baik dan tanpa kesadaran gizi masyarakatnya, maka sulit untuk mewujudkan mutu sumberdaya manusia yang tinggi sebagai generasi pembangun suatu negara. Eratnya kaitan antara pangan, gizi dan upaya peningkatan sumberdaya manusia maka selalu relevan untuk mempersoalkan hal tersebut dalam konteks prospek dan tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan.

Swasembada beras yang telah kita capai sejak tahun 1984 dengan berbagai modifikasi konsepnya adalah salah satu elemen penting dalam totalitas Kebijakan Pangan Indonesia. Jika kita melakukan *food resource accounting* baik yang bersumber dari daratan, gambut maupun lautan segera dapat disimpulkan bahwa sumber daya pangan kita tergolong mencukupi *potentially available* tetapi belum semuanya dikonsumsi *actually consumed*. Jurang perbedaan antara potensi pangan dan aktual yang tersedia seperti itulah yang masih harus kita gali, sehingga potensi tersebut menjadi tersedia secara aktual. Untuk itu pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya dari aspek teknologi pertanian dan sistem pangan saja tetapi juga harus dari kebijakan ekonomi yang tepat.

### II. BELAJAR DARI PENGALAMAN

Banyak pelajaran menarik dari usaha-usaha kita untuk mencapai swasembada beras. Komoditi ini, karena kedudukannya sebagai makanan pokok dan juga karena pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik, maka usaha pencapaian swasembada beras dilakukan secara besar-besaran. Hampir semua

sumberdaya dikerahkan untuk melaksanakan program swasembada beras. Semua aspek agribisnis beras di tangani secara menyeluruh, mulai dari penyediaan input produksi, penyediaan prasarana dan sarana, teknologi budidaya, rekayasa kelembagaan, penanganan masalah harga & pemasaran, dan pembiayaan baik melalui APBN maupun kredit KLBI untuk produksi & pemasaran disediakan dalam jumlah yang cukup. Kesemua aspek tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Menurut pengamatan saya sebagai mantan DEALUR BULOG dan GUBERNUR, ada empat faktor yang menunjang tercapainya swasembada beras, dimana faktor-faktor tersebut dapat menjadi pilar-pilar untuk mencapai swasembada pangan di luar beras. Faktor pertama adalah adanya "*revolusi hijau*" yaitu dengan ditemukannya padi ajaib PB5 & PB8. Cikal bakal ini kemudian yang mendorong ditemukannya padi jenis unggul umur pendek lainnya yang tahan terhadap berbagai serangan hama & penyakit. Pilar riset teknologi perbenihan inilah yang dapat kita kembangkan secara intensif, sehingga menjadi salah satu pilar upaya menuju swasembada pangan di luar beras. Tanpa riset yang kuat di bidang ini, maka sulit diharapkan untuk mencapai swasembada pangan secara ekonomis. Kita melihat bahwa benih unggul merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas. Apabila ini tidak segera dikembangkan, maka khasanah pertanian pangan (hortikultura) kita mungkin akan dipenuhi dengan nama bibit serba Bangkok dan Taiwan ?. Tentu hal ini memerlukan perhatian kita semua.

Kedua, usaha pencapaian swasembada beras juga ditunjang oleh "*revolusi teknologi ruber roll*" di bidang pengolahan. Dengan ditemukannya ruber roll tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya penggilingan padi kecil. Adanya investasi secara besar-besaran di bidang pengolahan padi, maka setiap kenaikan produksi padi dapat terserap habis. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana sulitnya mengatasi masalah surplus musiman pada saat produksi beras naik sebesar 2 juta ton selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 1980 & 1981, apabila alat pengolahnya tidak cukup. Sayang revolusi teknologi di bidang pengolahan ini dapat dikatakan perkembangannya lambat, baik untuk padi maupun untuk non padi. Umumnya teknologi pengolahan yang kita gunakan berasal dari impor termasuk untuk pasca panen & kemasannya. Mungkin di bidang riset terapan untuk bidang pengolahan pangan inilah titik lemah kita. Untuk aspek ini masih diperlukan perjuangan yang berat untuk dapat menjadi pilar dalam menunjang swasembada pangan.

Revolusi ketiga adalah "*revolusi di bidang transportasi dan telekomunikasi*". Sebelum tahun 1970 alat transportasi di pedesaan yang umum digunakan berupa alat gendong, pikul, kuda, cikar dan sebagainya. Kemudian pada awal tahun 1970 alat

transportasi berkembang menggunakan sepeda, dan seterusnya berkembang lagi dengan menggunakan alat transportasi kecil *pick-up* dan *minitruck* sehingga sangat menunjang angkutan gabah & beras dari desa ke kota dan antar tempat. Alat transport tersebut sangat membantu pemasaran gabah yang meningkat pesat. Sementara itu revolusi komunikasi terjadi dengan digunakannya satelit palapa untuk hubungan telepon & penyiaran televisi sehingga mempercepat arus informasi untuk para pelaku pasar dalam memperoleh informasi. Kedua macam revolusi ini dapat menjadi pilar-pilar upaya mencapai swasembada pangan di luar beras.

Faktor ke empat adalah "revolusi kelembagaan". Pembinaan kelembagaan merupakan upaya tersulit, karena sistemnya tidak dapat diimpor. Berbagai kelembagaan diciptakan & ditumbuhkan baik di tingkat administrasi pemerintahan, di bidang perkreditan, di bidang pemasaran dan penumbuhan kelembagaan di tingkat petani. Apabila aset yang sudah tertata secara sistematis seperti pada padi dapat dikembangkan untuk non padi, maka hal ini akan menjadi pilar yang kokoh untuk program swasembada pangan di luar beras.

Sementara itu swasembada jagung dapat dicapai dengan keberhasilan penyebaran jagung hibrida dan pembukaan peluang pasar baik di dalam negeri maupun ekspor. Tumbuhnya industri makanan ternak di dalam negeri dan membaiknya harga jagung di Bangkok membuat pertumbuhan produksi jagung di dalam negeri relatif tidak banyak mengalami hambatan pemasaran. Kasus pengembangan komoditi jagung ini merupakan kasus menarik untuk dipelajari. Harga jagung waktu panen jarang menjadi permasalahan. Sedangkan harga jagung pada saat paceklik juga cukup terkendali, hanya beberapa kali saja BULOG diminta turun tangan. BULOG melakukan intervensi dengan cara yang berbeda dengan sebelum deregulasi (sebelum 1988).

Menurut pengamatan saya di BULOG, kunci keberhasilan pengembangan komoditi jagung adalah pengendalian penyebaran benih hibrida. Penangkar benih hibrida berkepentingan agar harga jagung tetap tinggi, sehingga mereka membatasi jumlah benih yang akan disebar. Disamping itu benih ini tidak dapat dihasilkan oleh semua orang, sehingga penyebarannya lebih terkontrol.

Di luar beras dan jagung, komoditi yang sering menjadi masalah adalah ubi kayu/gaplek, karena menyangkut banyak petani kecil. Untuk daerah yang industri tapioka/chip berkembang baik seperti di Jawa, permasalahan yang timbul tidak banyak. Namun untuk Lampung sering mengalami over produksi karena penyerapannya terbatas terutama pada masa panen yang relatif singkat. Untuk komoditi ini cara penanganannya menurut pendapat saya adalah dengan promosi ekspor serta pembagian kuota ekspor yang tepat. Ini berarti bahwa sinyal yang dipakai petani

untuk memproduksi adalah harga luar negeri. Informasi pasar tersebut merupakan komponen utama untuk perencanaan produksi dan pemasaran. Tetapi masalah informasi pasar ini belum sepenuhnya efektif dan perlu di tingkatkan, sehingga menjadi sistem yang mantap.

Untuk gula pasir dan kedele, peningkatan produksi kedua komoditi ini diarahkan sebagai substitusi impor. Meskipun produksi cukup meningkat tetapi masih lebih rendah dari kebutuhan, sehingga jumlah kekurangan yang perlu diimpor dan harga dalam negeri lebih tinggi dibanding impor. Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan komoditi ini adalah belum ditemukannya benih unggul dan sistem budidaya yang cocok dengan keadaan kita yang sudah berubah.

Komoditi pangan lain yang berasal dari perkebunan seperti minyak sawit, memang sejak semula diarahkan untuk komoditi ekspor. Hasilnya cukup baik dan dapat bersaing di pasar internasional. Demikian juga untuk komoditi perikanan. Akan tetapi untuk komoditi buah-buahan yang diprogramkan untuk substitusi impor, hasilnya masih belum memuaskan, bahkan impor apel, anggur, sunkis dan sebagainya semakin banyak.

### III. PELUANG SWASEMBADA PANGAN

Tersedianya keragaman hayati *biodiversity* yang tersebar di wilayah Indonesia merupakan potensi besar yang dapat diolah menjadi pangan, dan hal ini sekaligus menjadi peluang yang dapat mengantar Indonesia ber-swasembada karbohidrat, protein dan lemak. Potensi pangan tersebut belum diolah secara optimal, sehingga dominasi karbohidrat yang berasal dari biji-bijian dan umbi-ubian dalam komposisi makanan pokok masyarakat sampai dengan Pelita V ini masih cukup besar.

Untuk mencapai swasembada pangan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan: pertama, kemauan politik pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumberdaya yang cukup di sektor tanaman yang di kelompokkan dalam pangan; kedua, terciptanya mekanisme pasar yang akan merangsang petani meningkatkan produksi; dan ketiga adanya perbaikan pendapatan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis pangan untuk perbaikan gizi.

Dalam rangka pengembangan pangan, pada kesempatan ini saya kembali mencoba mengungkapkan agar perhatian yang sama juga kita berikan kepada jenis pangan lokal yang terdapat di berbagai daerah. Kini saatnya kita perlu melihat kembali potensi pangan lokal tersebut dalam kerangka keamanan pangan (*food security*). Pengalaman menunjukkan bahwa kecukupan beras tidak selalu dapat

dijadikan jaminan bahwa kita sudah terbebas dari kekurangan kalori. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut bukan kekurangan beras tetapi kekurangan pangan lokal yang secara tradisional sudah lama menjadi makanan pokok. Di beberapa pelosok daerah di propinsi NTT kita melihat bahwa apabila ada kekurangan pangan, penyaluran beras dianggap belum cukup membantu karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah jagung dan jagung yang diperlukan juga jagung lokal. Demikian juga halnya dengan daerah di pedalaman Maluku dan Irija yang dikenal dengan tradisi makanan sagu. Oleh sebab itu perhatian terhadap jenis-jenis pangan lokal ini perlu lebih dikongkritkan dalam masa yang akan datang.

Salah satu potensi besar yang selama ini kurang memperoleh perhatian adalah peranan lautan sebagai sumber pangan. Selain untuk kepentingan ekspor, produk maritim sebagai sumber protein hewani perlu dikaji lebih mendalam untuk dijadikan penyangga swasembada protein yang tersedia dengan harga yang terjangkau oleh konsumen di dalam negeri. Di samping itu pengembangan industri *agro-fishery* juga memiliki dampak ganda karena hal tersebut dapat memperbaiki tingkat pendapatan para nelayan.

Usaha untuk mengubah potensi sumber daya yang tersedia memerlukan dana yang besar dan untuk itu perlu ada partisipasi sektor swasta. Sektor swasta perlu dirangsang secara sungguh-sungguh memasuki kegiatan pertanian khususnya pangan. Kita lihat tidak sedikit pengusaha yang mundur dari kegiatan agroindustri di bidang pangan karena tidak terjaminnya kontinuitas bahan baku, kualitas yang beragam dan harga yang berfluktuasi. Dalam era globalisasi ekonomi dan kebijakan yang semakin berorientasi kepada ekonomi pasar, maka semakin terbuka pula pilihan bagi petani untuk memaksimalkan pendapatan dengan mengusahakan komoditi yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini sejalan dengan jiwa Pasal 6 UU No. 12/1992 tentang sistem Budi Daya Tanaman yang memberikan petani kebebasan untuk menentukan tanaman yang menguntungkan baginya. Di dalam konteks tersebut maka orientasi produksi yang mengacu pada permintaan pasar menjadi sangat penting. Di sini loyalitas petani sebagai plasma kepada perusahaan inti dalam sistem PIR sulit terjamin jika petani sendiri tidak melihat adanya keuntungan atau tiadanya bantuan investasi khususnya bantuan perusahaan inti kepada petani plasma serta tidak adanya pemikulan resiko bersama (*risk sharing*).

#### IV. TANTANGAN DALAM MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN

Akhirnya kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap komoditi pangan dalam era PJPT II terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Pertama, usaha menciptakan iklim yang dapat merangsang kenaikan produksi berbagai jenis produksi pangan. Kedua, menciptakan sistem distribusi yang efisien dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Tak kalah pentingnya adalah meningkatkan nilai ekonomi pangan non beras yang dapat meyakinkan petani, bahwa tanaman pangan non beras juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga mereka terdorong untuk mengusahakan pangan non padi. Ketiga, pada era globalisasi batas-batas suatu negara relatif akan semakin kabur, artinya hal-hal yang terjadi di luar secara cepat akan ditransmisikan ke dalam negeri. Globalisasi ini menyangkut global teknologi (bioteknologi), global production, research and development yang global serta global efficiency. Keunggulan dalam bidang tersebut merupakan faktor penting dalam "memenangkan" perdagangan internasional. Dengan adanya GATT atau pembentukan kelompok-kelompok perdagangan regional seperti AFTA di kawasan ASEAN dalam beberapa hal mempermudah arus masuk bahan pangan ke Indonesia. Hal demikian di satu sisi semakin mempertajam persaingan yang tinggi antara barang impor dengan produk dalam negeri baik mutu maupun harga. Jika produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor, akan terjadi pengalihan preferensi konsumen dari produk dalam negeri ke produk impor. Bila ini terjadi sulit untuk mengembalikannya. Kasus makanan jajan/pangan tradisional yang kalah bersaing dengan pangan impor seperti fast food, adalah contoh yang perlu menjadi perhatian kita semua. Keempat, di dalam negeri tantangan yang kita hadapi juga cukup besar yang bersumber pada perbedaan budaya, selera, etnis dan agama. Tantangan dalam negeri yang bersifat lokal, regional dan nasional tersebut bersama-sama dengan tantangan global yang berpengaruh terhadap pasar dalam negeri akan menciptakan suatu tantangan yang bersifat *glocal* (yang merupakan gabungan antara global dan local). Keadaan ini menuntut kita untuk memikirkan pula masalah *ethnic food marketing* di samping nasional dan global marketing.

Potensi pasar pangan di dalam negeri sebenarnya masih besar untuk dikembangkan, dan ini merupakan faktor positif bagi upaya pencapaian swasembada pangan. Untuk itu maka orientasi kepada konsumen pasar sangat penting sebagai kemudi bagi terwujudnya swasembada pangan yang tidak saja memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga mampu memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional serta ketangguhan pangan nasional. Sebagaimana kita maklumi, swasembada beras kita capai memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan baru

berhasil setelah 17 tahun. Dalam hal ini kita perlu mengenal jati diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Kiat-kiat yang berhasil baik dan telah kita gunakan dalam mengupayakan swasembada beras, perlu terus dikembangkan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh untuk meniru "gaya" negara lain yang memang kondisinya berbeda. Kita sadari bahwa dalam pengembangan industri perberasan, kaitan kebijaksanaan di bidang produksi, distribusi dan pemasaran sangat erat. Di samping faktor lainnya, melalui mekanisme harga kita telah mampu mendorong produksi beras. Perlindungan kepada produsen tersebut sangat berhubungan dengan sistem buffer stock yang kita anut, yaitu pengadaan untuk mengamankan harga pasar dan jaminan penyaluran melalui golongan anggaran (pegawai negeri sipil dan ABRI). Dalam konteks ini maka peranan golongan anggaran dalam mewujudkan swasembada pangan (beras) sebenarnya sangat besar. Di masa mendatang peranan ini tetap diperlukan. Untuk ini maka upaya perbaikan pelayanan untuk golongan anggaran tidak cukup hanya dari sisi penyalurannya saja, tetapi harus dimulai sejak pemilihan/penyediaan benih bermutu baik, budidaya yang baik, penanganan pasca panen yang baik dan pengolahan yang baik. Persepsi konsumen terhadap mutu beras di negara kita sudah menyangkut selera dan rasa. Konsumen beras di Jawa umumnya menyukai beras yang pulen, berbau wangi dan warnanya mengkilat; padahal yang kita kembangkan saat ini adalah varietas padi yang nasinya "pera" dan kalau disimpan warnanya cepat berubah menjadi "dof".

Dengan melihat kompleksnya masalah pangan dan keterkaitan yang erat antar sektor dalam sistem pangan nasional maka dalam upaya mencapai swasembada pangan diperlukan kebijaksanaan pangan nasional yang jelas dan tegas sesuai dengan yang digariskan GBHN. Kebijakan tersebut bersifat sistematis, terkoordinir, integratif, kolektif dan memiliki jangkauan pengaturan yang menyeluruh baik dari sisi produksi, konsumsi, distribusi dan pemasaran. Kebijakan tersebut dapat bersifat makro nasional atau yang bersifat mikro yang lebih khusus dan detail. Memang dalam hubungan ini selalu ada peluang munculnya sifat *complementary* dan *trade off* antara kebijaksanaan pangan dan non pangan. Namun hal tersebut tidak perlu "dipertandingkan", tetapi justru "dipersandingkan".

Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi dan dalam kaitannya dengan era pasar global, pada seminar ini perlu kita kaji masalah efisiensi swasembada pangan (*food self sufficiency*), yaitu apakah kebijakan tersebut lebih efisien dibanding dengan keamanan pangan (*food security*). Masalah efisiensi ini penting tetapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa untuk komoditi pangan yang strategis tidak cukup dijawab hanya dalam kerangka konsep efisiensi saja karena ia juga harus dilihat dari konsep ketahanan ekonomi. Impor yang terlalu besar selain merupakan



beban terhadap anggaran juga dapat melahirkan *disincentive* bagi petani untuk meningkatkan produksi. Oleh sebab itu pilihan yang tepat adalah tetap meningkatkan produksi dan melakukan distribusi yang tepat sehingga kecukupan antar waktu dan tempat dapat dicapai. Di samping itu dalam rangka swasembada pangan kita juga perlu memperhatikan apakah semua jenis komoditi pangan perlu dikembangkan atau hanya komoditi yang kompetitif saja. Perlu kita sepakati, untuk komoditi tertentu yang kompetitif kita dorong ekspornya, hasilnya kita pakai untuk mengimpor komoditi yang tidak dapat kita produksi di dalam negeri atau karena biaya produksinya terlalu tinggi (mahal). Pengertian semacam ini cocok dengan konsep kemandirian yang kita anut, kalau kondisi obyektif tidak memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan, maka harus diimbangi dengan keunggulan yang lain untuk mengurangi kerawanan-kerawanan.

Dalam mencapai swasembada pangan, kita perlu memperhatikan bahwa upaya menciptakan iklim yang mendorong peningkatan produksi pangan antara lain sangat berkaitan dengan tersedianya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah serta adanya jaminan pemasaran produk tersebut. Kita melihat bahwa hampir semua pihak berkepentingan terhadap hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan sektor pertanian. Namun, kegiatan-kegiatan di bidang ini sering menghadapi kendala terbatasnya pendanaan dan beban tersebut hampir semuanya harus ditanggung pemerintah. Dari sisi petani, terbatasnya kegiatan di bidang riset dan pengembangan teknologi pangan serta fasilitas pemasaran misalnya menyebabkan industri pengolahan pangan di tangan petani masih sangat terbatas kemampuannya. Sehingga nilai tambah lebih banyak jatuh ke tangan pedagang dan pengusaha. Di tingkat petani pengolahan yang dapat dilakukan hanya terbatas sekedar memisahkan yang segar dengan yang "busuk", dan bukan untuk mengubah bentuk produksi. Hal terakhir ini sangat dirasakan untuk produk hortikultura yang bersifat mudah rusak (*perishable*), dan bervolume besar (*bulky*).

Pengalaman menunjukkan, hampir semua kegiatan agribisnis khususnya sub sektor komoditi pangan sulit berkembang secara lestari. Dengan kondisi petani kita yang sangat terbatas kemampuannya, kegagalan suatu program akan menyebabkan petani merasa "kapok" dan tidak aktif dalam kegiatan berikutnya. Sementara itu dari sisi pengusaha, keterbatasan fasilitas pemasaran juga merupakan masalah yang sulit dan mahal karena akan mendorong tingginya biaya produksi dan pemasaran. Infrastruktur yang tidak memadai, terutama di luar Pulau Jawa sering menjadi hambatan paling penting bagi pengusaha sebelum memulai usahanya. Diperkirakan hampir 40 persen dari biaya produksi sebelum mencapai pasar terhimpit oleh biaya angkutan, susut dan kerusakan barang dalam perjalanan. Hal

demikian mengakibatkan harga produsen menjadi tertekan, sehingga perolehan petani tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu tidak mengherankan adanya perbedaan harga yang besar antara harga daerah produsen di pedesaan dan harga pada musim panen dan musim paceklik untuk beberapa jenis komoditi pangan. Keadaan tersebut lebih sulit lagi karena langkanya pengusaha yang mau memikul resiko untuk melakukan pengumpulan produk, mengolah, menyimpan dan menjualnya pada waktu musim paceklik.

Kenyataan di atas menunjukkan betapa masalah teknologi pengolahan dan fasilitas pemasaran masih merupakan masalah khronis khususnya di sentra produksi. Dengan melihat bahwa hampir semua komoditi pangan tergolong mudah busuk, maka teknologi yang tepat serta jaminan pasar yang menguntungkan petani, maka usaha untuk meningkatkan produksi dapat menjadi bumerang kepada petani. Untuk memecahkan masalah pangan, kebijaksanaan yang bersifat nasional (sentralisasi) perlu dikembangkan secara bersama-sama dengan kebijaksanaan yang bersifat regional (desentralisasi). Kebijaksanaan regional strategis yang berpedoman kepada kebijaksanaan nasional strategis tersebut, dalam jangka panjang diarahkan kepada pengembangan pangan yang sesuai dengan aspek geografis, demografis, budaya/ethnis setempat dan praktis (*workable*). Dengan pengembangan pangan regional tersebut, diharapkan permintaan pangan setempat dapat dipenuhi dari produksi lokal, artinya apa yang dihasilkan di daerah setempat digunakan sebagai sumber utama kebutuhannya, sedangkan kekurangannya dipenuhi dari perdagangan dengan daerah lain. Ini berarti bahwa setiap daerah perlu menggali sumber pangan lokal yang memiliki keunggulan secara komperatif dan kompetitif. Dengan demikian jenis komoditi pangan yang dikembangkan dan kegiatan di bidang industri pangan lain dapat berbeda antar daerah. Disamping itu dengan ketergantungan yang tinggi antar daerah yang didasarkan kepada keunggulan masing-masing maka perdagangan antar daerah juga semakin terbuka. Apabila hal ini diintegrasikan dalam suatu wilayah regional maka dapat diperoleh suatu sistem yang memenuhi berbagai tujuan (*one system fits all*). Kombinasi antara kebijaksanaan pangan nasional dan regional tersebut diarahkan agar tetap efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pangan nasional di bidang pangan secara menyeluruh.

## V. PENUTUP

Pada akhir pengarahan ini ada 5 (lima) masalah yang ingin saya titipkan untuk dikaji dalam seminar ini. Pertama, mengenai masalah penguasaan lahan baik di darat maupun lautan. Kedua, pilihan komoditi tanaman pangan yang memberi

dampak pendapatan langsung kepada petani, terutama dalam jangka pendek. Ketiga, pemilihan teknologi yang paling tepat dalam mendorong peningkatan produksi, kegiatan pasca panen, khususnya dalam peningkatan mutu. Keempat, pilihan dukungan sektor infrastruktur dan kemudahan yang dapat ditawarkan kepada pelaku di subsektor komoditi pangan. Kelima, perumusan tujuan pengembangan tiap komoditi yang tepat, apakah tujuan untuk *food security*, untuk *substitusi import*, untuk bahan baku industri, untuk ekspor dan sebagainya. Kelima masalah tadi saya pandang cukup penting untuk dirumuskan pemecahannya, dan karena semua kegiatan di atas hanya dapat diselesaikan secara lintas sektoral, maka perumusan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyusunan kebijaksanaan swasembada pangan yang akan kita tuju.